

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk demokrasi, tak terkecuali pada pemilihan kepala daerah di tingkat desa (Pilkades). Pilkades dianggap sebagai alat demokrasi yang dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih secara bebas, rahasia dan langsung. Dimana masyarakat dapat mengontrol bagaimana kinerja pemerintah desa yang sedang dan akan berjalan. Pemilihan Kepala Desa ini merupakan agenda yang telah tertera pada Undang-Undang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, dengan masa jabatan enam tahun sejak tanggal pelantikan (Andriyanto, 2021). Pemilihan kepala desa adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin. Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih. (Ngabiyanto, 2006).

Pemilihan Kepala Desa atau *Klebun* sebutan dalam masyarakat Bangkalan ini merupakan peristiwa politik dan termasuk peristiwa kultural. Menurut Ainillah (2016) Pemilihan *Klebun* ini bukan sekedar upaya seseorang untuk mendapatkan kekuasaan akan tetapi juga sebagai pengukuhan status sosial yang sangat dekat dengan kehormatan, harga diri, dan juga keluarga, karena tidak semua dan sembarang orang yang mencalonkan diri untuk pemilihan umum kepala desa. Karena diantaranya harus memiliki kemampuan personal, memiliki ikatan kekerabatan *Blater*, kekayaan serta memiliki dan berhubungan langsung dengan jaringan keblateran yang mana tidak jauh dari adat Madura remoh dan Sandor.

Menurut Ainillah (2016), dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Madura, Blater yang merupakan *elite* desa Madura memberikan pengaruh dalam setiap kebijakan, penyelesaian masalah ataupun kontestasi pemilihan kepala desa. Pada daerah-daerah di Madura peran dan kebijakan elite Blater sangatlah menjadi pedoman utama. Karena Faktor kebudayaan dan sejarah *elite blater* sampai saat ini daerah di Madura masih menggunakan kebijakan dan keputusan blater dalam

setiap agenda di Madura. *Blater* yang merupakan *elite* pedesaan memiliki *social origin* dan tradisi, blater dibesarkan dalam unsur jagoanisme yang sangat dekat dengan kekerasan dan tidak jauh dari istilah adat shandor, remoh, kerapan sapi, istilah ini sangat terkenal di daerah Bangkalan dan Sampang. *Blater* pada saat ini dapat dikatakan sudah naik tingkatan sosial yang mana dalam *image* memiliki identitas sosial yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya dan perangai moral serta peradaban yang lebih tinggi (Ainillah, 2016).

Terdapat hal unik dalam Pemilihan Kepala Desa di Bangkalan, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ada sosok *elite Blater* yang menjadi salah satu elemen kesuksesan Pilkades. Namun peran relawan dan simpatisan pendukung tak dapat dilupakan begitu saja didalam daftar tim sukses setiap nama calon Kepala Desa. Menurut Rully dkk. (2021) mendefinisikan relawan sebagai gabungan dari individu yang terlibat secara sukarela untuk mengekspresikan identitas sosial mereka serta berkontribusi dalam kegiatan politik. Ada pula Schroeder (dalam Rizkiawati dkk, 2017) berpendapat relawan adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktu nyata mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Dari beberapa relawan tergerak dan berkumpul kemudian tergabung menjadi satu kesatuan yang bertujuan untuk membantu dan mengawal kandidat pilihan dalam mencapai visi misinya yakni menjadi Kepala Desa atau *Klebun*.

Orang Madura sering dipandang orang sebagai keras, emosional dan temperamental (Setyaningsih, 2021) hal tersebut sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi bagi kebanyakan orang yang memandang citra masyarakat Madura. Selaras dengan pernyataan Aziz dkk. (2020) *stereotype* yang menggambarkan Madura adalah masyarakat yang keras, garang, bahkan kejam. Hal tersebut seringkali diungkap oleh beberapa peneliti tentang Madura, termasuk diantaranya adalah Hub de Jonge (2011), mendeskripsikan Madura dalam antropologis dengan segala manifestasi sosial budayanya yang rentan akan kekerasan.

Ajang pemilihan Kepala Desa selalu menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas karena dalam prosesnya pemilihan Kepala Desa sering diwarnai kericuhan

yang disertai dengan kekerasan fisik antar kubu pendukung, keadaan ini seakan mewakili setiap proses berlangsungnya pemilihan Kepala Desa di Madura. Asumsi ini bukan hanya isapan jempol belaka, potensi terjadinya kekerasan selama pemilihan Kepala Desa di Madura terus teridentifikasi. Pada tahun 2019 misalnya, beberapa desa yang terletak di empat kabupaten di Madura yang akan melaksanakan pilkades terindikasi berpotensi terjadinya konflik (kekerasan). Di Kabupaten Sumenep terdapat 3 kecamatan, di Kabupaten Pamekasan ada tiga desa, Kabupaten Sampang terdapat 22 desa, dan Kabupaten Bangkalan sebanyak 33 desa yang semuanya dinilai rawan dan berpotensi terjadi konflik serta tindakan kekerasan (Saiman dkk, 2020).

Selaras dengan data yang telah dipaparkan di atas bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan yang paling tinggi tingkat rawan kerichannya. Dilansir dari artikel Beritajatim.com (2021) disebutkan bahwa menurut Kapolres Bangkalan terdapat 29 desa dengan tingkat rawan terjadi bentrok yang tinggi, 42 desa rawan bentrok dengan kategori sedang dan 49 desa yang termasuk kategori rawan bentrok rendah, namun tetap berpotensi terjadi bentrok saat Pemilihan Kepala Desa.

Berikut merupakan data kasus kisruh Pilkades yang telah dihimpun dari beberapa sumber dalam bentuk tabel:

Tabel 1. 1 Data Kasus Kisruh Pilkades Bangkalan

No	Tahun	Nama Desa	Kasus
1.	2021	Konang	Penganiayaan dan pengeroyokan ringan
2.	2021	Benangkah	Tindak kekerasan (penusukan sajam)

Sumber : Satreskrim Polres Bangkalan (2022)

Tabel 1. 2 Data Kasus Kisruh Pilkades Bangkalan

No.	Tahun	Nama Desa	Kasus
1.	2021	Perreng	Demo Pilkades terkait kecurangan nilai <i>scoring</i>
2.	2021	Tanah Merah	Demo Pilkades
3.	2021	Gili Anyar	Demo Pilkades terkait pencalonan nama Kades sebagai pejabat aktif
4.	2022	Bangkalan	Demo isu penundaan pelaksanaan Pilkades Tahap II

Sumber : bangsaonline.com (2022)

Selanjutnya sebagai pendukung data tersebut diatas, seperti yang dilansir dari laman berita Redaksi Pojok Suramadu (2021), tindak kekerasan yang menyebabkan satu korban terluka hingga dibawa ke rumah sakit yang diperkirakan berawal dari masalah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan berlanjut bentrok yang terjadi di Balai Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

Lebih lanjut dalam berita Sindonews.com (2021), insiden *carok* yang terjadi di Balai Desa Benangkah tersebut terjadi pada saat rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, namun kemudian terjadi cekcok antara aparat desa setempat dengan salah satu calon Kepala Desa dan sejumlah orang yang ada di lokasi. Kemudian cekcok tersebut berujung perkelahian memakai senjata tajam celurit hingga akhirnya salah satu seorang warga tumbang dikarenakan terkena sabetan celurit yang mengenai punggung dan lengannya. Fenomena - fenomena kekerasan di Madura tidak hanya berakhir dengan *carok*, tapi banyak kekerasan lain seperti perkelahian antar kelompok warga dan penganiayaan-penganiayaan baik itu antara sesama etnis Madura maupun dengan etnis lainnya (Taufik, 2003).

Muhtar (2013) mengungkapkan bahwa ada banyak sekali ditemukan konflik-konflik kekerasan yang terjadi di antara para partisipan pemilu, Konflik lokal dengan berbagai bentuk kekerasan dan aksi anarki lainnya juga kerap kali mewarnai proses pemilu. Banyak sekali insiden yang terjadi pada saat proses pemilu yang sedang berlangsung, baik secara verbal maupun non-verbal yang merupakan manifestasi perilaku agresif. Seperti kasus yang dilansir dari laman

SuaraJatim.id (2020), terdapat salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang mendapat ancaman pembunuhan dari oknum calon Kepala Desa Tanah Merah Laok. Motif ancaman tersebut antara lain dikarenakan Anggota DPRD tersebut diduga dianggap mendukung salah satu rival sang kades yang mengikuti kontestasi politik di desa tersebut.

Gambaran tersebut diatas seolah menunjukkan bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang penuh dengan kekerasan. Kekerasan yang banyak terjadi di Madura rentan identik dengan *carok*. *Carok* merupakan suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam pada umumnya celurit (Hudaniyah, 2006). *Carok* bagi orang Madura adalah penegakan harga diri dan penyelamatan kehormatan (Aziz dkk, 2020). Bahkan *Carok* oleh sebagian pelakunya dipandang sebagai alat untuk meraih posisi atau status sosial yang lebih tinggi sebagai orang jago dalam lingkungan komunitas mereka atau dalam lingkungan dunia luar. Bahkan dengan status ini mereka dapat meraih kedudukan formal dalam lingkungan institusi formal atau birokrasi yaitu sebagai kepala desa (Abdurrahman, 1987). Dewasa ini banyak orang menyalah gunakan *carok* sebagai pembelaan diri atas perbuatannya, padahal itu bukanlah lagi sebuah budaya *carok*, akan tetapi sebuah tindakan kriminal.

Selaras dengan hal tersebut Taufiq (2021) menyatakan bahwa keadaan lingkungan bisa membuat orang Madura mendapatkan respon-respon agresif dan dari kondisi lingkungan ini masyarakat Madura mengamini bahwa ini adalah tradisi yang harus dilakukan untuk menegaskan identitas kemaduraannya meski dalam pemahaman keagamaan orang Madura pembunuhan itu tidak dikehendaki. Meskipun Madura merupakan daerah yang kental akan agama Islam, namun dalam keadaan tertentu seperti tradisi carok, maka agama tidak berbanding lurus dengan konsekuensi dan doktrinnya. Kesan demikian semakin menambah konotasi negatif terhadap masyarakat etnis Madura, seolah masyarakat etnis Madura tidak pernah bisa diajak kompromi, sehingga susah diatur dan selalu mau menang sendiri, tidak mau tahu keberadaan orang lain (Setyaningsih, 2021).

Kekerasan dalam pemilihan Kepala Desa disini tidak hanya dilakukan oleh calon Kepala Desa kepada calon Kepala Desa lainnya namun juga bisa dilakukan

oleh pendukung atau para simpatisan kepada calon Kepala Desa lain. Kekerasan juga bisa dilakukan oleh calon Kepala Desa atau tim sukses kepada masyarakat maupun kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pendukung calon Kepala Desa kepada pendukung yang lain. Sarana kekerasan yang dilakukan diantaranya mulai dari kekerasan verbal berupa ancaman maupun kekerasan fisik berupa tindakan penganiayaan bahkan kekerasan spiritual atau magis (Saiman dkk, 2020).

Dari beberapa kasus yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk perilaku agresi baik fisik maupun verbal. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Sarwono (1999), bahwa salah satu faktor perilaku agresif adalah pengaruh dari kelompok. Secara konseptual Vasquez, Lickel, dan Henningan (2010) menyebutnya sebagai perilaku agresif berbasis kelompok. Pengaruh kelompok dalam perilaku agresi berupa menurunnya kendali moral yang kemudian mendorong munculnya perilaku agresif. Individu cenderung memunculkan perilaku agresif ketika mendapat provokasi secara langsung dari kelompoknya. Provokasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang cenderung memicu agresi pada penerimanya. Seringkali perilaku tersebut memiliki maksud buruk kepada orang lain. Hal itu menurut Le Bon disebabkan ketika berada dalam suatu gerombolan (*mob*), emosi dari satu individu akan menyebar ke seluruh anggota kelompok. (Taylor dkk, 2009).

Agresi sendiri menurut Sutowo dan Wibisono (2013) merupakan tindakan menyerang yang disertai dengan kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan terhadap lingkungan, orang lain bahkan diri sendiri. Kemudian Myers (2012) menyatakan agresi sebagai perilaku fisik atau verbal yang bermaksud untuk menyakiti seseorang. Ada pula pendapat dari Berkowitz (1995) yang mendefinisikan agresi sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Sedangkan menurut Buss dan Perry (1992) ialah sebagai suatu tindakan dengan tujuan memberikan stimulus berbahaya kepada organisme lain.

Adapun beberapa perilaku agresi yang dilakukan oleh para relawan simpatisan saat Pemilihan Kepala Desa merupakan tindakan negatif yang sangat membahayakan bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dampak

agresi bagi korban dari perilaku agresi ini akan merasakan kerugian baik fisik, psikis, hingga materil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sutowo dan Wibisono (2013), didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perilaku agresif antara lain adalah deindividuasi, kepatuhan dan kekuasaan, provokasi dan pengaruh alkohol. Sejalan dengan penelitian tersebut pendapat Berkowitz (1995) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi adalah frustrasi, stres, deindividuasi, kepatuhan dan kekuasaan, serta pengaruh alkohol dan obat-obatan.

Penelitian tersebut mendukung asumsi bahwa perilaku agresif yang dimunculkan individu terkait dengan *setting* lokasi tempat tinggal. Masyarakat etnis Madura dalam kehidupannya menggunakan landasan yang penting dan ditaatinya tangga kuasa *bhu, pa', babbhu', ghuru, rato* (ibu, bapak, sesepuh, guru baik formal maupun informal yaitu kyai, dan pemerintah atau raja jaman dulu) (Setyaningsih, 2021). Mencermati struktur sosial tersebut bermakna selain harus patuh dan hormat ibu, bapak, orang Madura juga patuh pada tokoh panutan (kyai atau guru) dan pemerintah atau raja-raja pada zaman dahulu. Ketundukan masyarakat etnis Madura terhadap struktur sosial tersebut merupakan standard dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik (Rifai, 2007). Standard tersebut membuat masyarakat merasa memiliki tanggung jawab sosial dan ketakutan kehilangan identitas kemaduraannya apabila melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan standard tersebut.

Orang Madura juga memiliki pembawaan atau karakter dasar diantaranya yakni *ejhin* (individualis), *gherra* (kaku dan kasar), *bangalan* (pemberani), *koko* (kukuh), *saduhunna* (apa adanya) (Rifai, 2007). Pembawaan dasar atau karakter dasar orang Madura ini berpengaruh terhadap etika berpolitik, salah satu dari pembawaan tersebut yakni *koko* (kukuh) menurut Hidayat (2009) berpotensi mengantarkan orang Madura untuk selalu loyal pada pekerjaan, setia kepada atasan dan patuh pada sistem serta pranata yang ada. Potensi baik dari orang Madura tersebut sering dimanfaatkan oleh segelintir orang dalam suatu proses fenomena politik tertentu. Dalam hal ini ada sesuatu yang tidak boleh dilupakan yakni pemimpin kelompok yang mampu “menyihir” dan mengomando anggota

kelompoknya. Biasanya peran ini disandang oleh para kyai, kepala desa (*klebun*), dan para blater.

Lebih lanjut dalam tulisannya Setyaningsih (2021) juga mengungkapkan bahwa orang Madura mengimplementasikan nilai budaya *taretan dibbhi'* (saudara sendiri) yang menggambarkan perilaku sangat humanis. Sikap berteman dan berkerabat orang Madura tercermin pada adanya nilai budaya ini, *oreng daddhi taretan, taretan daddhi oreng* (oranglain menjadi saudara, saudara bisa menjadi oranglain). Maksudnya, oranglain bisa dianggap sebagai saudara kandung bila memiliki perilaku sejalan atau sesuai watak dasar individu etnis Madura (*pseudo kinship*) (Setyaningsih, 2021). Dengan syarat bahwa pada saat menjalin hubungan atau berinteraksi sama-sama saling membantu, saling menghormati, saling menghargai dan akrab maka hubungan tersebut dapat menjadi *taretan dhibbi'*, namun sebaliknya apabila dalam proses berinteraksi salah satu pihak tidak dapat saling memahami, tidak mau membantu apabila mengalami kesulitan, tidak saling menghormati atau tidak akrab maka hubungan akan terputus atau bahkan muncul konflik dan kekerasan.

Le Bon menyatakan ketika seseorang berada dalam keramaian dan bersama dalam kelompok, perasaan mengenai tanggungjawab sosial dan ketakutan akan dikenali ketika melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma akan menghilang (dalam Li, 2010). Lebih lanjut menurut Le Bon jiwa massa mempunyai sifat tersendiri yang sangat berbeda dengan jiwa individu. Sehingga seseorang yang telah berada dalam massa akan kehilangan sifat jiwa individunya. Adapun sifat massa itu lebih impulsif, lebih mudah tersinggung, ingin bertindak dengan segera dan nyata, lebih mudah terbawa – bawa oleh sentiment, kurang raionil, lebih mudah dipengaruhi (*sugestibel*), lebih mudah mengintimidasi dan sebagainya (Ahmadi, 2009). Kemudian Le Bon menyebut keadaan tersebut dalam hal ini sebagai deindividuasi (Joesoef, 1981). Deindividuasi menurut Myers (2012) adalah hilangnya kewaspadaan diri dan penangkapan evaluasi terjadi dalam situasi kelompok yang mendukung respon terhadap norma kelompok, baik atau buruk.

Lebih lanjut Diener mendefinisikan deindividuasi sebagai proses psikologis dimana kesadaran diri (*self-awareness*) berkurang. Menurutny, proses

deindividuasi dapat terjadi apabila seseorang mampu menjauhkan diri dari “self-regulation” dan “self-awareness” yang melekat pada identitasnya sendiri, dimana dalam hal ini fokus dan perhatian hanya diprioritaskan kepada identitas kelompok (dalam Li, 2010). Kemudian pada 1980, Diener berfokus pada bagaimana anonimitas dapat memberi pengaruh negatif pada perilaku sosial individu, Diener juga menyatakan bahwa anonim menyebabkan individu kehilangan kesadaran akan sosial, atau identitas dirinya. Tahap kehilangan kesadaran ini merupakan elemen kunci yang menyebabkan terjadinya deindividuasi pada seseorang. Menurut Festinger (dalam Hilmawan, 2018), mendefinisikan deindividuasi sebagai keadaan dimana seseorang kehilangan kesadaran akan diri sendiri (*self awareness*) dan kehilangan pengertian evaluatif terhadap dirinya (*evaluation apprehension*) dalam situasi kelompok yang memungkinkan anonimitas dan mengalihkan atau menjauhkan perhatian dari individu.

Berdasarkan latar belakang masalah, deindividuasi terjadi karena faktor-faktor tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Myers (2012) adalah ketika orang berada dalam suatu kelompok yang besar, anonimitas fisik, stimulus teralihkan dan berkurangnya kesadaran diri. Saat pemilihan Kepala Desa di Bangkalan ini biasanya masyarakat terbagi menjadi beberapa kubu simpatisan calon Kepala Desa, yang kemudian berkumpul dan merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan. Dalam konteks kelompok inilah menurut Myers terkadang individu merasakan kondisi deindividuasi dan kepercayaan diri yang kuat dan lebih yang mengakibatkan perilaku agresif yang muncul akan semakin kuat, karena selama masa pemilu para simpatisan masing - masing kandidat gencar mempromosikan kandidat yang di usung hingga tak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar kelompok pendukung yang kemudian memunculkan perilaku agresi. Keadaan akan mulai memanasi sejak dari pembentukan kepanitiaan pemilihan, kemudian saat proses pemilihan berlangsung hingga pelantikan kepala desa terpilih.

Hal ini dikarenakan para simpatisan mengalami penurunan kesadaran diri maka mereka berada dalam kondisi terdeindividuasi, yang mengakibatkan berkurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan membuat mereka tidak lagi memperhatikan perilaku yang terikat dengan norma hingga menyebabkan

kerugian untuk lingkungannya. Dan bentuk perilaku-perilaku yang dihasilkan semacam ini merupakan bentuk perilaku agresi. Deindividuasi memperbesar kemungkinan terjadinya agresi karena deindividuasi menyingkirkan atau mengurangi peranan beberapa aspek yang terdapat pada individu yakni identitas diri atau personalitas individu pelaku maupun korban agresi (Dayakisni dan Hudaniyah, 2015). Menurut Aronson, dkk. (dalam Christiani, 2018) bahwa deindividuasi menjadi salah satu alasan seseorang melakukan perilaku impulsif kekerasan. Sejalan dengan penelitian Dunn and Rogers (dalam Sitorus, 2015) menyatakan bahwa deindividuasi juga efektif dalam meningkatkan perilaku agresi. Subjek yang diteliti mengatakan bahwa mereka merasakan emosi konsisten pada saat deindividuasi. Mereka mengindikasikan ada perasaan dan pemikiran yang berbeda dengan pada saat normal, tidak merasa bertanggung jawab pada saat melakukan agresi, tidak merasakan *self-conscious*, dan tidak memikirkan apa yang akan difikirkan oleh *experimenter* ataupun korban.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan tersebut diatas, maka peneliti ingin mengetahui apakah keadaan deindividuasi ini memiliki hubungan terhadap agresivitas yang dilakukan oleh relawan dalam pemilihan Kepala Desa di Bangkalan saat mendukung calon Kepala Desa pilihannya. Kemudian peneliti menarik judul dari penelitian ini adalah “Hubungan antara deindividuasi dengan agresivitas relawan dalam pemilihan Kepala Desa di Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara deindividuasi dengan agresivitas relawan dalam pemilihan Kepala Desa di Bangkalan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara deindividuasi dengan agresivitas relawan dalam pemilihan Kepala Desa di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan psikologi, khususnya bidang psikologi sosial untuk topik kajian agresivitas dan deindividuasi.

2. Manfaat Praktis

a. Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait bagaimana hubungan deindividuasi dengan agresivitas simpatisan dalam pemilihan Kepala Desa. Dapat menyadari penyebab munculnya agresivitas baik fisik ataupun verbal akibat deindividuasi kelompok sehingga kedepannya diharapkan yang mereka dapat lakukan adalah meminimalisir perilaku agresif.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan keeratan hubungan deindividuasi dengan perilaku agresi kelompok yang ada di masyarakat khususnya saat Pemilihan Kepala Desa.

c. Pemerintah Daerah dan Kepolisian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana hubungan deindividuasi dan agresivitas yang terjadi di masyarakatnya sehingga dapat memberikan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat meminimalisir perilaku agresi masyarakatnya pada saat pemilihan Kepala Desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa dengan variabel deindividuasi dan agresivitas.